▶ JALAN TOL

Sistem Penalti & Insentif Diperlukan

JAKARTA—Pemerintah perlu membuat penilaian investor mana yang serius dan tidak serius dalam menggarap bisnis tol dengan menerapkan sistem insentif dan penalti.

“Pemerintah perlu mulai meminta pemegang konsesi untuk serius, melihat lagi supaya lebih cepat perlu ada penalti dan insentif, sehingga serius pemainnya,” ujar Managing Director PT Nusantara Infrastructure Tbk Bernardus Djonoputro, Senin, (4/3).

Penalti diberikan jika pemegang konsesi tidak mampu mengerjakan proyek jalan bebas hambatan tepat waktu. Sementara itu, insentif diberikan kepada para pemegang konsesi yang mengerjakan proyek tepat waktu atau bahkan lebih cepat dari perencanaan.

Dia menjelaskan proyek jalan tol sisi bisnisnya terletak masa konsesi sehingga investasi di awal akan besar, tetapi akan berkurang seiring dengan beroperasinya sarana infrastruktur tersebut.

Dia menilai masalah tanah masih menjadi penghalang utama berbagai proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Penerapan UU No.

2/2012 tentang Pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dinilai perlu mengingat banyaknya proyek yang terhambat karena pembebasan lahan.

Untuk tiga ruas jalan tol trans-Jawa yang mandek, katanya, pemerintah perlu terobosan inovatif dengan menerapkan UU baru di ketiga proyek tersebut.

Bila perlu, pemerintah bersama pemegang konsesi sama-sama turun ke lapangan untuk membantu proses pembebasan lahan.

“Pendanaan umumnya tidak masalah, dengan skema 30% *equity* dan 70% perbankan itu sudah ideal. Pembebasan lahan menjadi variabel penentu dalam hal ini,” tegasnya.

Sementara itu, untuk penambahan ruas jalan tol baru, Nusantara Infrastructure menyiapkan sekitar Rp10 triliun untuk menggarap dua proyek di mana perusahaan lolos tahap prakualifikasi. Kedua ruas jalan tol itu ialah Medan-Kuala Namu-Tebing Tinggi dan Serpong-Balaraja.

“Estimasi untuk ruas jalan tol Serpong-Balaraja sekitar Rp5 triliun, Kuala Namu juga demikian,” ujar Bernardus. (Thomas Mola)